Jurnal Riset Entrepreneurship
http://journal.umg.ac.id/index.php/jre
Vol. 9 No. (2) 2026, 61-77

e-ISSN: 2621-153X
doi: 10.30587/jre.v6i1.4024

MENELAAH PENERAPAN TATA KELOLA UMKM ANYAMAN PURUN XYZ

Herlina[1]*, Fitri Novi Windu[2], Nyayu Fadilah Fabiany[3]
[1,2,3] Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi
Email Korespondensi: herlinabuditeguh@gmail.com

Affiliasi
1.Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi
2,3. Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi

Histori Artikel
Received:
31 July 2026
Reviewed:
4 Agustus 2026
Revised:
12 Agustus 2026
Accepted:
14 Agustus 2026

Abstract
Abstract The XYZ purun weaving MSME faces production and marketing challenges. This situation indicates that the governance of the XYZ purun weaving MSME is not yet functioning optimally. Effective governance should support production process management, expand market reach, and enhance business competitiveness and sustainability. This study aims to analyze the application of MSME governance principles within the XYZ purun weaving business. A descriptive research method was employed. The results indicate that the application of governance principles at the XYZ purun weaving MSME falls into three categories: implemented, implemented but not yet optimal, and not yet implemented. First, the implemented category comprises two principles: accountability in operational functions and independence. Second, the implemented but not yet optimal category includes three principles: accountability in human resource functions, accountability in marketing functions, and responsibility. Third, the not yet implemented category consists of three principles: transparency, accountability in financial functions, and fairness. The research findings contribute management information that serves as a basis for formulating practices aimed at optimizing the governance of the XYZ purun weaving MSME to enhance its performance.

Keywords:
MSME Governance, Implementation, Purun Weaving

Abstract
Background- Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) require governance to support growth, competitiveness, and sustainability. The XYZ purun weaving MSME faces unstable marketing, limited production facilities, inadequate financial management, weak digital promotion, and product development challenges. These conditions indicate that governance has not been implemented optimally. This study therefore examines the application of MSME governance principles and identifies implementation barriers within the XYZ purun weaving business in Pematang Buluh Village, Jambi.

Design / Methodology / Approach -This study employed a descriptive qualitative approach to examine governance implementation in the XYZ purun weaving MSME. Research subjects were MSME actors selected through purposive sampling based on the business location, sixteen-year operating history, and development challenges. Primary data were collected through interviews using a questionnaire, while secondary data were obtained from literature. Data were analyzed descriptively through data reduction, presentation, and conclusion drawing, using specific modified MSME governance indicators.

Findings - The findings classify governance implementation into three categories: implemented, implemented but not yet optimal, and not yet implemented. Operational accountability and independence were implemented. Human resource accountability, marketing accountability, and

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

responsibility were implemented but remained suboptimal. Transparency, financial accountability, and fairness were not yet implemented. Barriers included informal employment relationships, limited financial planning, insufficient human resource systems, restricted digital marketing capabilities, limited certification knowledge, and the simple scale of operations.

Research Implication - The findings provide management information for strengthening governance in the XYZ purun weaving MSME. Priority actions include establishing written employment agreements, separating business and personal finances, improving financial recording and planning, developing structured human resource training and evaluation, strengthening digital marketing and distribution, improving product development, and increasing legal and certification literacy. These measures can help improve operational control, market access, decision quality, competitiveness, and long-term sustainability while maintaining involvement.

Limitations - This study focuses on one purun weaving MSME in Pematang Buluh Village, limiting the transferability of findings to other MSMEs, regions, or craft sectors. The descriptive qualitative design provides an in-depth governance picture but does not quantify its effects on business performance. Data were primarily based on interviews and business records, which may reflect participant perceptions. Future studies should involve multiple MSMEs, comparative cases, longitudinal observations, and quantitative performance measures.

PENDAHULUAN

Peningkatan usaha merupakan tujuan utama bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Masih ditemukan adanya UMKM yang berkembang dan yang gagal. Kegagalan UMKM disebabkan oleh tata kelola yang lemah (Novandi et al., 2018). Pertumbuhan UMKM harus diiringi dengan tata kelola. Peningkatan skala UMKM artinya dibutuhkan tata kelola yang memadai (Iqbal, 2015). Tata kelola akan mengarahkan UMKM dalam beraktivitas untuk tumbuh lebih berkembang (Kurniawati et al., 2018). Maka dari itu, tata kelola yang harus diterapkan adalah indikator tata kelola yang sesuai dengan kondisi UMKM agar tidak membebani UMKM dalam peningkatan kinerja (Rinaldo et al., 2023).

Tidak semua UMKM mampu menyelaraskan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama yang beroperasi di wilayah pedesaan dan memiliki keterbatasan literasi digital (Judijanto et al., 2025). Pada praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan yang menyebabkan pengelolaan UMKM belum berjalan optimal. Mulai dari pengelolaan keuangan, pengembangan produk, pengelolaan sumber daya manusia, dan tata kelola pemasaran. Terjadi penurunan penjualan pada kerajinan anyaman purun Galoe Tjempaka (Ernawati et al., 2021). Keterbatasan inovasi desain, manajemen usaha dan strategi pemasaran membuat produk anyaman purun UMKM Beujroh kurang memiliki daya saing (Hasni et al., 2026).. Pemasaran produk kerajinan anyaman masih dilakukan secara manual sehingga menghambat jangkauan pasar (Prasaja et al., 2025). Kondisi tersebut juga terlihat pada UMKM anyaman purun XYZ dihadapkan pada berbagai hambatan dalam rangka meningkatkan skala usaha.

Berdasarkan survey awal, UMKM anyaman purun XYZ berada di wilayah yang tumbuh tanaman purun. Produk anyaman purun yang diusahakan adalah tas purun, dompet, alas gelas namun yang paling banyak diproduksi adalah tas. Salah satunya berupa tas untuk wadah map atau laptop dan belanja. Motif anyaman beragam mulai dari motif liris, belang catur, dan yang lainnya namun belum ada ciri khas daerah. Diakui pemilik usaha bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan usaha anyaman purun adalah dari aspek pemasaran yang tidak stabil. Di sisi operasional, masih minim perlengkapan untuk melakukan variasi pada anyaman purun, termasuk jika musim hujan sulit melakukan pengeringan. Adanya permasalahan penjualan yang tidak stabil dapat diartikan bahwa usaha anyaman purun XYZ masih kurang analisis pasar, evaluasi kinerja penjualan, dan pengambilan keputusan berbasis data, belum optimalnya pengelolaan strategi

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

pengembangan produk dan branding, belum optimalnya pengelolaan investasi usaha, belum ada sistem pengelolaan produksi yang memadai. Adapun strategi yang dapat dilakukan UMKM anyaman purun XYZ dalam pengembangan untuk menjadi produk unggulan dan bisa bersaing di pasar adalah dengan strategi insentif yaitu strategi penetrasi pasar, strategi penguatan usaha dan strategi pengembangan produk (Ernawati et al., 2021). Meskipun telah ada strategi, namun strategi tersebut tidak dapat diimplementasikan secara efektif tanpa tata kelola yang mendukung. Maka dari itu, perlu menelaah tata kelola yang sedang dijalankan UMKM anyaman purun XYZ. Adanya kendala produksi dan pemasaran menunjukkan bahwa tata kelola UMKM anyaman purun XYZ belum berjalan secara optimal. Tata kelola yang baik seharusnya mampu mendukung pengelolaan proses produksi, memperluas pemasaran, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Potensi ketersediaan bahan baku tanaman purun di wilayah rawa gambut dan keunikan anyaman purun saja belum tentu cukup untuk memenangkan persaingan, karena kualitas, efisiensi, pemasaran, dan kemampuan beradaptasi sangat menentukan keberhasilan UMKM anyaman purun XYZ. Persaingan dengan produk modern dan produk impor menuntut pelaku usaha anyaman purun XYZ memiliki tata kelola yang lebih baik. Penerapan prinsip tata kelola terutama transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan disiplin kerja dan kinerja pekerja pada konteks UMKM melalui kejelasan target, pemberian tugas, dan evaluasi berbasisi data (Mutamimah et al., 2023). Artinya penerapan tata kelola yang tepat dapat mendukung peningkatan produktivitas, pengembangan usaha, serta keberlanjutan produk kerajinan lokal anyaman purun XYZ.

Berdasarkan penjabaran yang sudah dikemukakan di atas, penelitian ini dimotivasi oleh upaya untuk mengungkapkan gambaran penerapan indikator tata kelola UMKM pada usaha anyaman purun XYZ dan hambatan dihadapinya agar dapat diketahui prinsip tata kelola yang telah diterapkan maupun yang belum diterapkan. Mengingat bahwa anyaman purun merupakan bagian dari UMKM yang harus terus bertahan maka salah satu kunci keberhasilan UMKM tergantung dari penerapan tata kelolanya.

KAJIAN TEORI

Tata Kelola

Tata Kelola (governance) mengacu pada seperangkat prinsip, struktur dan mekanisme yang menjamin kegiatan usaha dijalankan secara terarah, terkendali, dan adil. Pada perusahaan besar, tata kelola identik dengan dewan komisaris, komite audit, dan sistem pengendalian internal formal. Pada UMKM, bentuknya lebih sederhana, namun substansinya tetap sama yaitu menegaskan peran dan tanggung jawab, menetapkan aturan pengelolaan, dan menata sistem pengawasan agar keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada satu orang tanpa control (Romdhon et al., 2026).

Di Indonesia, prinsip tata kelola yang sering digunakan dikenal dengan akronim TARIF yakni transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung jawab), independency (kemandirian), dan fairness (keadilan/kewajaran). Prinsip ini juga sejalan dengan pedoman governansi korporat nasional yang menekankan perilaku beretika dan akuntabilitas sebagai pilar utama (Komite Nasional kebijakan Governansi, 2021).

Bagi UMKM, adapun prinsip-prinsip tata kelola UMKM yang dapat menjadi standar bagi kinerja UMKM yakni prinsip transparansi berupa adanya kontrak kerja, prinsip akuntabilitas berupa fungsi keuangan, fungsi operasional, fungsi sumber daya manusia, fungsi pemasaran, prinsip tanggung jawab berupa UMKM berbadan hukum, membayar pajak serta produk bersertifikasi, prinsip kemandirian berupa tingkat utang yang rendah dan prinsip keadilan berupa jenjang karir untuk semua pekerja, penghargaan dan hukuman yang adil, kesempatan yang sama dalam menyampaikan ide (Rinaldo et al., 2023).

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai unit usaha yang mempunyai skala kecil dalam aspek aset, jumlah pekerja, serta omset, namun berperan dalam mendistribusikan aktivitas ekonomi secara merata di berbagai wilayah (Judijanto et al., 2025). Ciri lain UMKM adalah fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar, namun sekaligus rentan terhadap fluktuasi ekonomi makro dan perubahan regulasi. Pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan pengelompokan UMKM berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kriteria UMKM Menurut PP 7 Tahun 2021

Kategori	Modal Usaha (tidak termasuk tanah & bangunan)	Hasil Penjualan Tahunan	Catatan
Mikro	≤ Rp 1 miliar	≤ Rp 2 miliar	Pasar 35-36; modal untuk usaha baru, penjualan untuk usaha berjalan
Kecil	> Rp 1 miliar s.d Rp 5 miliar	> Rp 2 miliar s.d Rp 15 miliar	Batasan mengikuti PP7/2021
Menengah	> Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	> Rp 15 miliar s.d Rp 50 miliar	Kriteria tidak termasuk tanah&bangunan usaha

Sumber: M Romdhon, 2026

UMKM menghadapi berbagai tantangan struktural dan nonstruktural yang menghambat peningkatan kapasitas berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pemahaman manajemen usaha, hingga hambatan birokrasi dalam perizinan dan regulasi. Keterbatasan modal kerja menjadi penghambat utama dalam pengembangan usaha, karena sebagian besar UMKM bergantung pada dana pribadi atau pinjaman informal. Kurangnya literasi keuangan menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak mampu mengelola arus kas secara profesional, yang berdampak pada efisiensi operasional dan pengambilan keputusan strategis (Judijanto et al., 2025). Maka dari itu UMKM harus memiliki kesiapan menghadapi tantangan tersebut dimulai dengan penataan pengelolaan usaha yang baik.

Anyaman Purun

Purun merupakan tumbuhan semak yang biasa ditemui di daerah rawa maupun tepian sungai. Purun tumbuh di Pulau Sumatera maupun Kalimantan. Purun adalah tumbuhan pengendali hayati hama penggerek padi melalui memerangkap telur hama (Asikin & Thamrin, 2012). Selain itu, purun juga dapat menyerap logam berat dan berperan sebagai biofilter senyawa toksin yang larut dalam air. Tumbuhan purun juga memiliki manfaat lain jika dikaitkan dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Purun dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat tikar, topi, tas (bakul, kampil, anjat), alas kaki, alas piring makan dan sejenisnya.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif di mana peneliti adalah instrumen kunci dengan tujuan memahami dan menafsirkan fenomena

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

subjek penelitian dengan mendeskripsikan secara detail. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan penerapan tata kelola UMKM pada usaha anyaman purun XYZ. Sampel penelitian adalah pelaku UMKM anyaman purun XYZ yang berdomisili di Desa Pematang Buluh Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dasar pertimbangan penentuan subjek penelitian adalah lokasi tempat tumbuhnya tanaman purun merupakan wilayah rawa dan usaha anyaman purun XYZ sudah berdiri 16 tahun sejak tahun 2010 namun masih menghadapi kendala pengembangan usaha.

Data yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui wawancara dengan bantuan kuesioner, dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur. Tata kelola UMKM yang dianalisis menggunakan pendekatan prinsip tata kelola dengan indikator yang telah dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan usaha kecil agar tidak menjadi beban UMKM (Rinaldo et al., 2023). Adapun indikator tata kelola UMKM yang dikembangkan oleh Rinaldo et al (2023) terlihat pada tabel 2.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengetahui penerapan indikator tata kelola untuk UMKM dan hambatan yang dihadapi oleh usaha anyaman purun XYZ. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis akan memberikan gambaran mengenai prinsip tata kelola yang telah diterapkan maupun yang belum diterapkan oleh UMKM anyaman purun XYZ. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2026.

Tabel 2. Indikator Implementasi Tata Kelola UMKM untuk Meningkatkan Kinerja

Transparansi	Akuntabilitas	Tanggung Jawab	Independensi	Keadilan
Keberadaan kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan	Indikator Fungsi Keuangan 1. Kelengkapan laporan keuangan 2. Adanya cadangan darurat perusahaan yang terpisah dari keuangan pribadi 3. Adanya sistem perencanaan keuangan 4. Adanya standar penilaian kinerja keuangan	UMKM sudah menjadi badan hukum	Tingkat utang rendah	Setiap pekerjaan memiliki jalur karier terstruktur yang berlaku untuk semua pekerja
	Indikator Fungsi Operasional 1. Ketergantungan rendah pada pemasok tertentu 2. Kejelasan prosedur operasi standar untuk setiap pekerjaan, dari masuk hingga keluar 3. Ketersediaan teknologi yang tepat 4. Ketersediaan sistem manajemen data untuk setiap sumber daya yang terlibat dalam proses operasi di Perusahaan 5. Menetapkan standar untuk setiap inventaris	Produk UMKM telah tersertifikasi.		Adanya sistem penghargaan dan hukuman yang terstruktur dan adil.

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

	(bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi)			
	Indikator Sumber Daya Manusia 1. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi formal 2. Program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan dan formal 3. Penempatan karyawan berdasarkan kompetensi 4. Tersedianya Deskripsi Pekerjaan dan Spesifikasi Pekerjaan formal	UMKM secara rutin membayar pajak		Karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan ide-ide mereka berdasarkan kemampuan mereka
	Indikator Fungsi Pemasaran 1. Memiliki segmen pasar sasaran yang jelas. 2. Membuat rencana promosi yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tersebut. 3. Memiliki Strategi Penetapan Harga yang jelas. 4. Memiliki strategi penempatan yang jelas dan tepat.	Perhatian UKM terhadap lingkungan dan masyarakat		

Sumber: Rinaldo et al (2023)

HASIL PENELITIAN

Tata kelola yang baik bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Tata kelola pada UMKM anyaman purun XYZ yang dibahas mencakup pengelolaan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, keadilan yang telah dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan UMKM agar tidak membebani UMKM.

Penerapan Prinsip Transparansi dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ

Transparansi sangat penting dalam penerapan tata kelola sebab dapat menjaga objektivitas dalam menjalankan usaha, penyediaan informasi yang relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Adapun indikator prinsip transparansi pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Transparansi Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Transparansi	Penerapan	Hambatan
1	Adanya kontrak kerja antara pemilik usaha dan karyawan	Belum diterapkan	Penerapan yang dilakukan adalah sistem kerja borongan dengan pembayaran berdasarkan jumlah anyaman yang dihasilkan. Jumlah tenaga kerja lebih kurang 5 orang.

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

			Hambatan yaitu karakteristik pekerjaan yang masih sesuai pesanan, kemudian hubungan kerja berdasarkan saling kepercayaan, sehingga kontrak kerja tidak dilakukan secara tertulis

Sumber: data diolah, 2026

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja secara transparan dan wajar (Komite Nasional kebijakan Governansi, 2021). Penetapan standar tanggung jawab yang berhubungan dengan kinerja meliputi fungsi keuangan, operasional, sumber daya manusia dan pemasaran berguna untuk memastikan setiap bidang dapat berjalan dengan baik (Rinaldo et al., 2023).

a. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Keuangan

UMKM anyaman purun XYZ harus memperhatikan indikator pada fungsi keuangan agar usahanya dapat terus berkembang. Adapun indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi keuangan pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Keuangan Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Akuntabilitas (Fungsi Keuangan)	Penerapan	Hambatan
1	Kelengkapan laporan keuangan	Telah diterapkan secara optimal	Usaha telah memiliki catatan sederhana yakni pesanan dan upah pekerja, belum berupa laporan keuangan yang lengkap. Hambatan yaitu pemisahan keuangan usaha dan pribadi belum dilakukan
2	Keberadaan cadangan darurat perusahaan yang terpisah dari keuangan pribadi.	Belum diterapkan	Dana yang berasal dari pembayaran DP, dana pribadi hanya untuk mencukupi biaya produksi sehingga belum ada dana darurat untuk cadangan usaha Hambatan yaitu usaha masih bergantung pada pembayaran pesanan dan dukungan keuangan pribadi.
3	Adanya sistem perencanaan keuangan untuk investasi pada pengembangan usaha	Belum diterapkan	Belum ada rencana pengelolaan keuangan untuk pengembangan usaha. Hambatan yaitu usaha masih dilakukan dengan cara sederhana dan manual misalnya promosi masih minim dan mengandalkan pajangan di gerai UMKM Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan gerai batik milik keluarga serta di rumah pribadi
4	Adanya standar penilaian kinerja keuangan untuk pengambilan keputusan saat ini	Belum diterapkan	Keputusan penetapan harga jual masih berdasarkan biaya produksi dan ditetapkan harga yang paling minimum Hambatan yaitu usaha masih belum mencari keuntungan besar namun untuk mengisi waktu luang bekerja di rumah

Sumber: data diolah, 2026

b. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Operasional

Manajemen operasional merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengarahan dan pengendalian serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

yang dimiliki untuk merubah input menjadi output barang dan jasa (Parinduri et al., 2020). Manajemen operasional diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis yang bertujuan untuk mengontrol aktivitas produksi. UMKM anyaman purun XYZ harus memperhatikan indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi operasional agar usahanya dapat terus berproduksi. Adapun indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi operasional pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Operasional Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Akuntabilitas (Fungsi Operasional)	Penerapan	Hambatan
1	Tingkat ketergantungan yang rendah pada pemasok tertentu	Telah diterapkan dengan baik	Bahan baku mudah diperoleh dan tidak bergantung pada pemasok tertentu. Hambatan yang dihadapi terkait dengan bahan baku berupa proses pengeringan yang mengandalkan sinar matahari, terutama ketika musim hujan.
2	Terdapat prosedur dan standar yang telah ditetapkan untuk setiap jenis pekerjaan, dari masuk hingga keluar.	Telah diterapkan	Adanya standar kualitas proses dan produk anyaman purun untuk menjaga kualitas Hambatan yaitu masih terdapat pekerja yang memiliki keterbatasan keterampilan sehingga belum mampu memenuhi standar kualitas produk dan tidak dapat dilibatkan menyelesaikan pesanan produk.
3	Ketersediaan teknologi yang tepat	Telah diterapkan namun belum optimal	Pemilik usaha memiliki alat penumbuk secara manual. Mesin modern tersedia dalam bentuk fasilitas kelompok. Hambatan yaitu keterbatasan modal, karena harus mengeluarkan biaya Rp 5.000.- per ikat untuk biaya penumbuk mesin.
4	Data bisnis dikelola secara metodis.	Telah diterapkan, namun belum optimal	Sudah dilakukan pendataan, namun belum optimal. Misalnya, jumlah pelanggan tetap, sudah tercatat di buku pemesanan. Produksi yang dilakukan pekerja juga dicatat dengan baik agar pembayaran upah sesuai dengan produk yang dihasilkan masing-masing pekerja. Demikian juga dengan data pengrajin purun yang ada di desa Pematang Buluh. Belum ada perekapan dalam setahun, jadi baru bersifat setiap ada pesanan saja.
5	Menetapkan standar untuk setiap inventaris (bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi)	Telah diterapkan	Memiliki standar bahan baku yang bisa digunakan, purun yang dibeli dari pencari bahan baku dilakukan penyortiran terlebih dahulu agar terjaga kualitasnya. Proses pembuatan juga dilakukan secara ketat, ada proses *finishing* untuk memastikan kualitas produk jadi.

Sumber: data diolah, 2026

c. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Sumber Daya Manusia

Pengelolaan usaha kecil dominan bergantung pada manusia. Sumber daya manusia (SDM) sangat berperan dalam meningkatkan kinerja usaha (Rohmania & Solikhah, 2024). yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang beragam (Hermawan & Damai, 2012). Pemilik UMKM anyaman purun XYZ harus memperhatikan indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi sumber daya manusia agar kinerja usahanya mengalami peningkatan. Adapun

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi sumber daya manusia pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 6.

Tabel 6. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Fungsi Sumber Daya Manusia Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Akuntabilitas (Fungsi Sumber Daya Manusia)	Penerapan	Hambatan
1	Adanya sistem rekrutmen dan seleksi formal.	Belum diterapkan	Calon pekerja usaha anyaman purun XYZ terlebih dahulu mengikuti pelatihan dengan pemilik usaha. Setelah dinilai memiliki keterampilan yang memadai, selanjutnya diberikan pekerjaan menganyam purun yang dapat dikerjakan dari rumah masing-masing. Seleksi dilakukan berdasarkan hasil pelatihan dan kemampuan menganyam, sedangkan penilaian kinerja didasarkan pada kualitas produk yang dihasilkan Hambatan yaitu hanya sedikit yang berminat untuk menganyaman purun sehingga belum perlu seleksi formal.
2	Tersedia program pelatihan dan pengembangan karyawan yang berkelanjutan dan formal.	Belum diterapkan	Pelatihan bersifat pendampingan langsung oleh pemilik UMKM anyaman purun XYZ. Pendampingan difokuskan pada pemberian bimbingan mengenai teknik menganyam yang benar, terutama pada bagian-bagian yang rumit, sehingga pekerja dapat meningkatkan kualitas hasil anyaman. Hambatan yaitu pendampingan belum terstruktur sebagai program pelatihan
3	Pemilik usaha menugaskan karyawan berdasarkan kompetensi mereka.	Telah diterapkan	Pemesanan anyaman akan disesuaikan dengan keterampilan pekerja, karena tidak semua pekerja dapat menganyam aneka jenis anyaman purun.
4	Tersedia deskripsi dan spesifikasi pekerjaan resmi.	Belum sepenuhn ya diterapkan	Tersedia standar produk yang layak jual sebagai acuan bagi pekerja. Standar tersebut untuk pedoman kualitas hasil kerja daripada deskripsi dan spesifikasi pekerjaan yang berisi tugas, tanggung jawab, serta kualifikasi pekerja. Hambatan yaitu pemberian tugas dilakukan secara langsung sehingga tidak memiliki acuan tertulis.
5	Ketersediaan sistem evaluasi formal	Belum diterapkan	Belum diterapkan sistem evaluasi formal untuk SDM. evaluasi yang telah dilakukan adalah penilaian kualitas hasil kerja (produk) sebagai bentuk evaluasi yang masih bersifat informal. Hambatan yakni tidak ada hambatan yang secara langsung disebutkan oleh responden, tetapi terdapat keterbatasan karena evaluasi belum mencakup aspek kinerja karyawan secara menyeluruh.

Sumber: Data diolah, 2026

d. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Pemasaran

Pemahaman terhadap preferensi konsumen, melalui aktivitas pemasaran yang terencana dan terorganisir dapat menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

akan mendorong pertumbuhan bisnis secara optimal (Sayyid, 2020). Namun, potensi pertumbuhan bisnis terhambat oleh kurangnya distribusi dan penerimaan produk yang optimal (Syahbani et al., 2024). Peluang pasar digital sangat luas, tetapi di sisi lain, kemampuan UMKM dalam memanfaatkannya masih rendah (Faisol et al., 2025). Pemilik UMKM anyaman purun XYZ harus memperhatikan indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi pemasaran agar usaha tetap kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan dinamis. Adapun indikator prinsip akuntabilitas dalam fungsi pemasaran pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 7.

Tabel 7. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Akuntabilitas dalam dalam Fungsi Pemasaran Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Akuntabilitas (Fungsi Pemasaran)	Penerapan	Hambatan
1	Keberadaan segmen pasar sasaran yang terdefinisi	Telah diterapkan namun masih bersifat umum	Pelaku UMKM anyaman purun telah mengidentifikasi target pasar produknya, yaitu kalangan ibu-ibu, lembaga pemerintah seperti Lapas Kelas IIA Tanjung Jabung Barat dan dinas-dinas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta konsumen perorangan. Namun, segmentasi pasar tersebut belum dirinci seperti usia, lokasi, tingkat pendapatan, gaya hidup, dan perilaku pembelian.
2	Keberadaan perencanaan promosi yang sesuai dengan kebutuhan segmen	Belum diterapkan	Promosi yang dilakukan masih sangat terbatas dan sederhana melalui etalase di berbagai lokasi. Belum memanfaatkan media sosial maupun perluasan. Hambatan yaitu keterbatasan keterampilan tentang pemasaran digital
3	Keberadaan strategi penetapan harga yang terdefinisi dengan baik	Telah diterapkan namun belum optimal	Penetapan harga dilakukan dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, upah, tingkat kerumitan produk, serta penggunaan bahan tambahan. Selain itu, harga produk ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga produk sejenis di pasaran. Mislanya harga anyaman purun, mulai dari Rp. 15.000, hingga Rp.75.000, Artinya strategi penetapan harga belum memperhatikan harga pesaing atau daya beli konsumen
4	Keberadaan rencana distribusi produk yang terdefinisi dengan baik dan tepat	Telah diterapkan namun masih sederhana	Penyaluran produk hanya melalui sistem pemasaran berbasis *pre-order* (PO). Belum ada perluasan saluran penjualan misalnya melalui marketplace.
5	Program pengembangan strategi produk tersedia berdasarkan kategori dan permintaan pelanggan.	Belum diterapkan	Berupa penguatan atribut produk dengan pemberian merek usaha dan pencantuman nomor telepon pada produk untuk memudahkan pelanggan melakukan pemesanan. Hambatan yaitu keterbatasan modal untuk pengembangan

Sumber: Data diolah, 2026

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ

Tanggung jawab menekankan adanya sistem yang jelas dalam mengatur mekanisme pertanggungjawaban kegiatan usaha. Prinsip dasar tanggung jawab adalah aktivitas usaha

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

harus mematuhi peraturan perundang–undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga usaha dapat berkesinambungan. Tanggung jawab mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama. Pertanggungjawaban sangat dibutuhkan untuk mengelola usaha anyaman purun XYZ agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Adapun indikator prinsip tanggung jawab pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 8.

Tabel 8. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Tanggung Jawab Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Tanggung Jawab	Penerapan	Hambatan
1	Usaha menjadi badan hukum sehingga mempermudah akses pendanaan dan pasar	Belum diterapkan	Usaha sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai legalitas usaha, tetapi belum menunjukkan adanya pembentukan badan hukum formal. Hambatan yaitu keterbatasan modal dan belum ada pemisahan aset usaha dan asset pribadi
2	Produk anyaman purun telah tersertifikasi.	Belum diterapkan	Responden belum mengetahui proses dan tempat pengurusannya. Hambatan yaitu keterbatasan informasi tentang prosedur pengurusan sertifikasi produk.
3	Usaha bersedia membayar pajak apabila usaha telah memenuhi ketentuan perpajakan	Telah diterapkan	Adanya pembayaran pajak sebagai tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Dalam menjalankan usaha sudah memperhatikan lingkungan dan kondisi sosial masyarakat di sekitar	Telah diterapkan	Keterlibatan masyarakat sekitar yakni kaum ibu-ibu pada proses pembuatan anyaman purun serta pekerja laki-laki yang membantu dalam pengadaan bahan baku. Artinya ada upaya pemberdayaan masyarakat dan kontribusi usaha terhadap kondisi sosial ekonomi lingkungan sekitar.

Sumber: Data diolah, 2026

Penerapan Prinsip Kemandirian dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ

Kemandirian berarti organisasi dikelola secara profesional tanpa adanya dominasi atau intervensi pihak tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Penerapan prinsip independensi bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa Keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan usaha. Pemilik UMKM anyaman purun XYZ harus memperhatikan indikator prinsip kemandirian guna menghindari konflik yang tidak terikat oleh banyak pihak. Adapun indikator prinsip kemandirian pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 9.

Tabel 9. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Kemandirian Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Kemandirian	Penerapan	Uraian

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

1	Usaha memiliki tingkat utang yang rendah.	Telah diterapkan	Tidak ada pinjaman modal dari pihak luar sehingga tingkat utangnya rendah

Sumber: Data diolah, 2026

Penerapan Prinsip Keadilan dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ
Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemilik usaha dengan berbagai pihak, misalnya pemerintah, karyawan, pelanggan, maupun pihak lainnya**.** Pemilik UMKM anyaman purun XYZ harus memperhatikan indikator prinsip keadilan guna memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar pada perjanjian dan peraturan. Adapun indikator prinsip kemandirian pada UMKM anyaman purun XYZ ditunjukkan pada tabel 10.

Tabel 10. Penerapan dan Hambatan Tata Kelola Prinsip Keadilan Pada UMKM Anyaman Purun XYZ

No	Indikator Keadilan	Penerapan	Hambatan
1	Setiap pekerjaan memiliki jalur karier terstruktur yang berlaku untuk semua pekerja	Belum diterapkan	Pekerja masih direkrut sesuai ada atau tidak pesanan jadi pengembangan fokus pada pendampingan keterampilan menganyam. Hambatan yakni usaha berbasis pesanan
2	Adanya sistem penghargaan dan hukuman yang terstruktur dan adil bagi karyawan	Belum diterapkan	Terdapat sistem penghargaan berupa pemberian upah berdasarkan jumlah unit produk yang diselesaikan dan pembinaan bagi pekerja yang belum mampu menyelesaikan anyaman dengan baik. Artinya belum ada bonus bagi yang mencapai target dan teguran bagi pekerja yang melanggar prosedur. Hambatan yaitu skala usaha masih sederhana
3	Karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide-ide mereka berdasarkan kemampuan mereka.	Belum diterapkan	Karyawan dalam menjalankan pekerjaan masih berfokus pada pengerjaan produk sesuai dengan pesanan konsumen. Hambatan yaitu pekerjaan masih berfokus pada pemenuhan pesanan

Sumber: Data diolah, 2026

PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Transparansi dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ
Temuan yang mengulas indikator prinsip transparansi pada UMKM anyaman purun XYZ menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola masih bertumpu pada kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi apabila terjadi permasalahan dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan kontrak kerja tertulis, pembagian tugas yang lebih jelas berdasarkan kompetensi pekerja. Semakin transparan pemilik UMKM terhadap karyawannya, maka akan meningkatkan kinerja para

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

karyawan, di mana adanya informasi terkait perkembangan usaha dan pengambilan keputusan secara terbuka yang melibatkan karyawan akan membuat para karyawan totalitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Syamsuddin, 2023).

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ

a. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Keuangan
   Prinsip akuntabilitas dalam fungsi keuangan pada UMKM anyaman purun XYZ mengemukakan bahwa fungsi keuangan belum sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. Keterbatasan catatan laporan keuangan berpotensi menghambat pemilik usaha mengevaluasi kinerja keuangan. Arus kas masih bersumber dari pembayaran DP dan pelunasan pesanan anyaman. Fungsi perencanaan keuangan belum digunakan untuk menyusun rencana utama investasi dan posisi keuangan usaha anyaman purun XYZ. Kondisi ini mencerminkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan belum disertai dengan strategi risiko. Upaya antisipasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kinerja keuangan yakni pencatatan pengeluaran dan pendapatan, menyusun dan menganalisis laporan keuangan, melakukan standarisasi biaya dalam kegiatan produksi lalu menetapkan harga pokok penjualan dan harga jual sesuai target profit yang ingin dicapai, pemeriksaan keuangan secara periode akuntansi untuk mengetahui usaha mengalami financial distress atau tidak (Halpiah & Putra, 2024)
b. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Operasional
   Pengelolaan usaha pada prinsip akuntabilitas dalam fungsi operasional dapat dicermati bahwa mayoritas semua indikator telah diterapkan UMKM anyaman purun XYZ. Artinya UMKM anyaman purun XYZ dapat mempertanggungjawabkan pencapaian target produksi dan menjaga kualitas produk. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mampu membantu pelaku usaha mengurangi kesalahan kerja, meningkatkan kualitas produk, menjaga konsistensi proses produksi, serta meningkatkan efisiensi operasional usaha (Istiqomah, 2023). Standarisasi proses operasional merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kualitas produk, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mempermudah proses pengendalian mutu (Heizer et al., 2020). Oleh karena itu, adanya SOP menjadi langkah awal dalam membangun sistem operasional yang lebih efektif bagi UMKM anyaman purun XYZ.
c. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Sumber Daya Manusia
   Analisis prinsip akuntabilitas dalam fungsi sumber daya manusia pada hasil penelitian dapat digambarkan bahwa hanya satu indikator yang telah diterapkan yakni penugasan secara kompetensi, di mana model anyaman purun beragam sehingga tidak semua tenaga kerja mampu menyelesaikan anyaman dengan rapi. Selanjutnya, hambatan secara menyeluruh dalam aspek akuntabilitas pada fungsi sumber daya manusia disebabkan kondisi kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sagala et al (2026) bahwa UMKM menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman tata kelola, dan lemahnya sistem pengawasan. Keterbatasan tenaga kerja menggambarkan bahwa UMKM anyaman purun XYZ belum memiliki kapasitas SDM yang memadai dalam pemerataan kemampuan kerja sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketergantungan pada tenaga kerja yang lebih terampil. Oleh karena itu, penguatan tata kelola SDM melalui strategi regenerasi tenaga kerja, peningkatan kompetensi untuk daya saing UMKM.
d. Prinsip Akuntabilitas dalam Fungsi Pemasaran
   Prinsip akuntabilitas dalam fungsi pemasaran yang dijalankan oleh UMKM anyaman purun ZYZ menyiratkan bahwa fungsi pemasaran belum sepenuhnya mampu

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

mempertanggungjawabkan pencapaian target pertumbuhan pasar karena masih terdapat keterbatasan dalam pengembangan produk, distribusi produk, penetapan harga jual dan promosi sesuai segmentasi pasar. Ketergantungan pada sistem pesanan menunjukkan bahwa perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan strategi distribusi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan pasar. Pentingnya integrasi teknologi dalam strategi UMKM untuk memperluas pasar (Parameswari et al., 2025). Pelatihan berbasis teknologi dan strategi tata kelola produk berdampak pada peningkatan daya saing UMKM. Keterbatasan strategi produk dapat menyebabkan UMKM kurang optimal dalam menciptakan inovasi, mempertahankan daya tarik konsumen, dan menghadapi persaingan pasar yang semakin dinamis. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemasaran melalui pemanfaatan teknologi digital, pengembangan jaringan distribusi, pengelolaan persediaan yang lebih efektif, serta penyusunan strategi produk yang terarah menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan UMKM anyaman purun XYZ.

Penerapan Prinsip Tanggung Jawab dan Hambatan yang dihadapi UMKM Anyaman Purun XYZ

Pengelolaan usaha pada prinsip tanggung jawab, dapat dicermati bahwa beberapa indikator dari aspek tanggung jawab telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Pemilik UMKM anyaman purun XYZ memiliki kesadaran membayar pajak dan peduli pada kondisi sosial masyarakat sekitar. Penerapan aspek perpajakan menunjukkan bahwa aktivitas usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Faktor sosial ekonomi sangat mempengaruhi kepatuhan pajak (PUTRA et al., 2025). UMKM anyaman purun XYZ tidak hanya berorientasi pada keberlanjutan usaha, tetapi juga memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Namun disisi lain indikator usaha berbadan hukum dan produk bersertifikasi masih menghadapi hambatan dalam menjalankan tata kelola. Adanya hambatan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpengaruh terhadap daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, peningkatan tanggung jawab dalam tata kelola UMKM anyaman purun XYZ dapat dilakukan melalui penguatan legalitas usaha dan peningkatan literasi regulasi.

Penerapan Prinsip Kemandirian dan Hambatan yang dihadapi Anyaman Purun XYZ

Terlaksananya prinsip kemandirian di UMKM anyaman purun XYZ menunjukkan bahwa tata kelola berjalan dengan baik. UMKM yang menerapkan prinsip kemandirian dapat lebih profesional dalam mengelolah usahanya, karena lebih fokus untuk mencapai target dan tujuan yang ingin dicapai (Syamsuddin, 2023). Sebaliknya, apabila pelaku usaha memiliki tingkat hutang tinggi, tidak mampu melunasi kewajiban sehingga hutang semakin bertambah sementara profit terus menurun maka akan mengakibatkan kebangkrutan (Alamsyah et al., 2021).

Penerapan Prinsip Keadilan dan Hambatan yang dihadapi Anyaman Purun XYZ

Mencermati fakta di lapangan mengungkapkan pada prinsip keadilan bahwa hambatan variasi kompetensi menyebabkan UMKM anyaman purun XYZ mengutamakan pendekatan pembinaan dan penyesuaian pembagian pekerjaan dibandingkan penerapan hukuman yang bersifat kaku. Pendekatan tersebut mencerminkan upaya menjaga produktivitas sekaligus mempertahankan hubungan kerja yang harmonis. Meskipun indikator prinsip keadilan belum diterapkan di UMKM anyaman purun XYZ, namun antara pekerja dan pemilik memiliki hubungan emosional sehingga tetap harmonis. UMKM anyaman purun XYZ dapat memulai dengan melakukan evaluasi pekerjaan sehingga pekerja dapat menyampaikan saran atau ide, serta perlu mengembangkan sistem penghargaan dan hukuman yang objektif

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan tata kelola pada UMKM anyaman purun XYZ menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya optimal dan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Pertama, prinsip yang telah diterapkan dengan baik meliputi akuntabilitas dalam fungsi operasional dan kemandirian. Fungsi operasional didukung oleh standar kualitas proses dan produk, pengelolaan bahan baku, serta pencatatan produksi, sedangkan kemandirian tercermin dari rendahnya ketergantungan terhadap utang atau pembiayaan eksternal. Kedua, prinsip yang telah diterapkan tetapi belum optimal mencakup akuntabilitas fungsi sumber daya manusia, akuntabilitas fungsi pemasaran, dan tanggung jawab. Kelemahan utamanya terlihat pada belum terstrukturnya pelatihan dan evaluasi SDM, segmentasi dan promosi yang masih sederhana, keterbatasan distribusi dan pengembangan produk, serta belum optimalnya legalitas dan sertifikasi produk. Ketiga, prinsip yang belum diterapkan adalah transparansi, akuntabilitas fungsi keuangan, dan keadilan, terutama karena belum tersedia kontrak kerja tertulis, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, perencanaan keuangan, sistem evaluasi keuangan, jalur karier, serta mekanisme penghargaan dan penyampaian ide yang terstruktur. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu UMKM anyaman purun dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan pada UMKM lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian belum mengukur secara kuantitatif hubungan antara penerapan tata kelola dan kinerja usaha. Penelitian selanjutnya diarahkan pada studi komparatif beberapa UMKM anyaman purun atau UMKM kerajinan sejenis, dengan melibatkan lebih banyak informan dan wilayah penelitian. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan pendekatan mixed methods untuk menguji pengaruh masing-masing prinsip tata kelola terhadap kinerja, daya saing, digitalisasi pemasaran, dan keberlanjutan UMKM. Dengan demikian, penelitian mendatang tidak hanya memetakan tingkat penerapan tata kelola, tetapi juga menghasilkan model tata kelola UMKM yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi pengembangan usaha kerajinan berbasis sumber daya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, M. F., Husin, W. L., & Idris, Z. I. (2021). Memprediksi potensi kebangkrutan dengan metode Fullmer H-Score pada usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis,* 22(2), 319–334.

Asikin, S., & Thamrin, M. (2012). Manfaat purun tikus (Eleocharis dulcis) pada ekosistem sawah rawa. *Jurnal Litbang Pertanian*, 31(1), 35–42.

Ernawati, E., Hurriyati, R., & Dirgantari, P. D. (2021). Strategi pengembangan kerajinan anyaman Purun untuk meningkatkan daya saing. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(1), 27–40.

Faisol, F., Wahyudin, A., & Djasuli, M. (2025). Potret pengetahuan pelaku UMKM toko kelontong Madura dalam penyusunan laporan keuangan. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 9(2), 192–207.

Halpiah, H., & Putra, H. A. (2024). Mitigasi kebangkrutan: Penguatan bisnis UMKM melalui intervensi akuntansi. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 7(1), 83–94.

Hasni, K., Wahyuni, S., Muharramsyah, R., & Natasya, P. (2026). Pemberdayaan Pemberdayaan Pengrajin Purun Melalui Pelatihan Inovasi, Keuangan, dan Pemasaran Digital UMKM Beujroh. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 637–646.

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

Heizer, J., Render, B., Munson, C. L., & Griffin, P. (2020). *Operations management: Sustainability and supply chain management.*

Hermawan, H., & Damai, D. C. (2012). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil menengah (UMKM) kota madiun. *Universitas Merdeka Madiun,* 1, 29–38.

Iqbal, M. (2015). SME governance in Indonesia–a survey and insight from private companies. *Procedia Economics and Finance,* 31, 387–398.

Istiqomah, I. (2023). Pengembangan UMKM melalui pelatihan Standard Operational Procedure dalam program karang mitra usaha. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 436–441.

Judijanto, L., Destiana, D., & Pertiwi, H. P. (2025). *UMKM berdaya saing*. PT. Green Pustaka Indonesia.

Komite Nasional kebijakan Governansi, K. (2021). *Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI).* https://knkg.or.id/wp-content/uploads/2024/03/PUGKI-LORES-UPDATE-2024.pdf

Kurniawati, S. L., Sari, L. P., & Kartika, T. P. D. (2018). Development of good SME governance in Indonesia: An empirical study of Surabaya. *International Journal of Economics and Management,* 12(1), 305–319.

Mutamimah, M., Alifah, S., & Adnjani, M. D. (2023). Corporate governance innovation framework to reduce credit risk in MSMEs using blockchain technology. *Cogent Business & Management,* 10(3), 2250504.

Novandi, D. R., Yudeline, M. H., & Diryana, I. (2018). Creating MSMES governance indicators, as evaluation tools and reference in creating a good corporate governance. *JBFEM*, 1(2), 205–216.

Parameswari, R., Putra, F. P., Rudiyanto, R., Tantowi, D., Gunawan, V., & Gulo, N. S. K. (2025). Penguatan Pasar UMKM melalui Digitalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Produk. *JPMNT JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT NIAN TANA*, 3(4), 19–29.

Parinduri, L., Hasdiana, S., Purba, P. B., Sudarso, A., Marzuki, I., Armus, R., Rozaini, N., Purba, B., Purba, S., & Ahdiyat, M. (2020). *Manajemen Operasional: Teori dan Strategi*. Yayasan Kita Menulis.

Prasaja, A. S., Sagala, I., & Wati, E. R. (2025). Empowering UMKM of Woven Handicrafts Through Digital Marketing and Social Media in Pematang Buluh Village, Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province: Pemberdayaan UMKM Kerajinan Anyaman Melalui Digital Marketing dan Media Sosial di Desa Pematang Buluh. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat),* 9(1), 37–42.

PUTRA, D. F., Rohmah, A., Putri, V. N., Setyowati, A., & Al Munawaroh, N. H. (2025). Analisis Prinsip Responsibility dalam GCG terhadap Pembayaran Pajak. *Wallaby: Jurnal Manajemen, Bisnis & Akuntansi,* 2(2), 105–110.

Rinaldo, D., Sari, P. A., Sari, W. P., & Miharja, R. (2023). The Development of Good Micro, Small and Medium Enterprises Governance Indicators. *Etikonomi,* 22(1), 93–118.

Rohmania, A. S., & Solikhah, E. (2024). Pengaruh aspek keuangan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kinerja usaha UMKM di Jawa Tengah. *Manajemen Sumber Daya Manusia,* 1(01), 24–34.

Romdhon, M., Anggraeni, W. A., Nurlaela, L., Lestari, D. F., Prayoga, C. J., Hanifah, H. S., Fadilah, R. A., Harahap, E. F., Putri, M. D., & Suryaman, Y. (2026). *Akuntabilitas, Pajak, dan Tata Kelola UMKM.* Dira Media Kreasindo.

Sagala, M. H., Wibisono, F., Safana, A., Hidayah, S. N., & Wardhani, N. S. (2026). Implementasi Good Corporate Governance pada Bisnis Besar dan UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 4(1), 130–140.

Sayyid, M. (2020). Strategi Pemasaran Bisnis Farmasi. Zifatama Jawara.

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia

Syahbani, F., Fadilah, I. R., Nurohim, R., Harto, H., Salsabila, G. S., Nurhaliza, S., Handayani, D. F., Hilyati, I., Hamzah, A. H. L., & Khairunnisa, F. Z. (2024). Pelatihan digital marketing dan pameran UMKM sebagai sarana pengembangan strategi pemasaran: Studi kasus UMKM Desa Tanjungsiang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara,* 5(1), 259–266.

Syamsuddin, S. (2023). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam meningkatkan kinerja karyawan. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2225–2233.

This is an open access article under the CC BY license.
This Article is Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Entrepreneurship Department University ofMuhammadiyah Gresik, East Java, Indonesia